

Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Perbatasan Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Kampar

Vransiska Ratih¹ Raden Imam Al Hafis²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution
No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: vransiskaratih@student.uir.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of inter-regional cooperation in waste management in the border area between Pekanbaru City and Kampar Regency and to identify the inhibiting factors. Waste management issues in border areas are complex due to the involvement of two different administrative authorities, while community activities often transcend territorial boundaries, resulting in overlapping responsibilities and ineffective public service delivery. This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, observations, and documentation involving related agencies and local communities in the border area. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that cooperation has been formalized through a Cooperation Agreement (PKS), yet its implementation has not been fully optimal, particularly in terms of coordination, program sustainability, evaluation, and community education. The inhibiting factors include limited technical coordination, lack of joint supervision, low public awareness, and the absence of structured evaluation and follow-up mechanisms. This study recommends strengthening cross-regional coordination and establishing a more structured joint evaluation mechanism to achieve effective and sustainable waste management.

Key Words : *Inter-regional Cooperation, Waste Management, Border Area, Public Administration, Governance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah di wilayah perbatasan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Permasalahan sampah di kawasan perbatasan menjadi kompleks karena melibatkan dua kewenangan administratif yang berbeda, sementara aktivitas masyarakat bersifat lintas wilayah sehingga menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab dan ketidakefektifan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan instansi terkait serta masyarakat di wilayah perbatasan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama telah diformalkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), namun implementasinya belum berjalan optimal terutama dalam aspek koordinasi, keberlanjutan program, evaluasi, dan edukasi masyarakat. Faktor penghambat meliputi keterbatasan koordinasi teknis, kurangnya pengawasan bersama, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme evaluasi dan tindak lanjut program. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas daerah dan mekanisme evaluasi bersama yang lebih terstruktur untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Key Words : *Kerja Sama Antar Daerah, Pengelolaan Sampah, Wilayah Perbatasan, Administrasi Publik, Tata Kelola Pemerintahan.*

Pendahuluan

Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, serta aktivitas ekonomi yang semakin kompleks menyebabkan volume sampah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Persoalan ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi telah berkembang menjadi isu multidimensional yang mencakup kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah, namun tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara parsial karena sebagian permasalahan bersifat lintas wilayah administratif.

Wilayah perbatasan antar daerah seringkali menjadi titik rawan dalam pengelolaan sampah. Aktivitas masyarakat yang melintasi batas administratif menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, terutama dalam penyediaan layanan publik. Kondisi ini juga terjadi di wilayah perbatasan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Beberapa kawasan seperti Teropong dan Pandau Permai secara administratif berada di wilayah Kampar, namun secara sosial dan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan Pekanbaru. Hal ini menimbulkan kebingungan tanggung jawab dalam pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), sehingga sering terjadi penumpukan sampah dan keluhan masyarakat.

Secara normatif, kerja sama antar daerah telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan mengenai kerja sama daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kampar juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengelolaan sampah di wilayah perbatasan. Namun demikian, implementasi kerja sama tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya koordinasi teknis, kurangnya evaluasi bersama, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai wilayah administratifnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian administrasi publik, serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola kolaboratif lintas wilayah.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Administrasi Publik

Menurut (Rosenbloom et al., 2022), administrasi publik merupakan proses kerja sama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administratif semata, tetapi mencakup seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Peters (Peters, 2020) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan sistem pengelolaan kebijakan yang melibatkan organisasi pemerintah dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengawasi kebijakan publik. Peters menekankan pentingnya efektivitas institusi dan kapasitas birokrasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan pendapat tersebut, administrasi publik dalam penelitian ini dipahami sebagai kerangka penyelenggaraan pelayanan persampahan oleh pemerintah daerah,

khususnya dalam konteks kerja sama lintas wilayah antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

2. Konsep Organisasi

Menurut (Nurman et al., 2023), organisasi adalah suatu sistem yang terstruktur yang memuat pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu.

(Agung Kurniawan & Suswanta, 2021) menyatakan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama secara terkoordinasi guna mencapai tujuan bersama

Dalam penelitian ini, organisasi merujuk pada perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Struktur dan mekanisme koordinasi dalam organisasi memengaruhi efektivitas implementasi kerja sama.

3. Konsep Manajemen Publik

Menurut konsep yang kamu gunakan di skripsi, manajemen publik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya publik untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat.

Manajemen publik menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah. Dalam konteks kerja sama pengelolaan sampah, manajemen publik mencakup penyusunan perencanaan bersama, pembagian tanggung jawab teknis, pengelolaan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Dengan demikian, manajemen publik dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana kedua pemerintah daerah mengelola pelaksanaan kerja sama secara administratif dan operasional.

4. Konsep Kerja Sama Antar Daerah

Teori kerja sama yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada James N. Rosnow (1984) yang menyatakan bahwa kerja sama merupakan hubungan sosial antara dua pihak atau lebih yang bekerja bersama melalui komunikasi dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama.

Rosnow menekankan bahwa keberhasilan kerja sama dipengaruhi oleh kesepahaman, komunikasi yang terbuka, serta evaluasi yang berkelanjutan.

(Nugraha, 2022) menambahkan pentingnya mutual trust dalam kerja sama antar daerah. (Pribadi, 2021) juga menjelaskan bahwa keberadaan institusi netral diperlukan untuk menjaga keseimbangan relasi dan melakukan monitoring kerja sama [OBJ].

Indikator kerja sama dalam penelitian ini mengacu pada kesepakatan formal, komunikasi, keberlanjutan program, manfaat bersama, serta evaluasi dan umpan balik .

5. Konsep Pengelolaan Sampah

(Amasuomo, E.; Baird, 2020)), mengatakan bahwa sampah merupakan hasil samping aktivitas manusia yang tidak lagi memiliki nilai guna.

(Holimah et al., 2024) menjelaskan bahwa sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan wujud, sumber, dan tingkat bahayanya [OBJ].

Pengelolaan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Dalam wilayah perbatasan administratif, pengelolaan sampah menjadi kompleks karena melibatkan lintas kewenangan dan aktivitas masyarakat antar wilayah.

6. Konsep Governance

(Mehraj & Shamim, 2020) mendefinisikan governance sebagai proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam konteks politik, ekonomi, dan administratif [10].

(Riwukore et al., 2022) menekankan bahwa governance melibatkan berbagai aktor dalam pengelolaan sumber daya publik secara efektif dan adil.

World Bank (1990) menyatakan bahwa governance mencakup rezim politik, pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial, serta kapasitas institusi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan. OECD (2022) juga menegaskan pentingnya legitimasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam penelitian ini, governance digunakan untuk menganalisis bagaimana tata kelola kerja sama pengelolaan sampah dijalankan secara kolaboratif dan akuntabel.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan sampah lintas wilayah, khususnya dalam konteks tata kelola dan implementasi kebijakan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan sampah. Informan terdiri dari pihak pemerintah daerah yang terlibat dalam kerja sama serta masyarakat di wilayah perbatasan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kerja sama, observasi dilakukan untuk melihat kondisi faktual pengelolaan sampah di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi seperti perjanjian kerja sama dan laporan terkait.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan teori kerja sama antar daerah menurut James N. Rosnow (1984), efektivitas kerja sama dapat dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu kesepakatan formal, frekuensi pertemuan dan komunikasi, keberlanjutan program, manfaat yang dirasakan, serta evaluasi dan umpan balik. Hasil penelitian mengenai kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan temuan sebagai berikut:

1. Kesepakatan Formal

Secara administratif, kerja sama telah dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur pembagian tanggung jawab

pengelolaan sampah di wilayah perbatasan. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan kerja sama.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan formal telah terpenuhi, implementasi di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan isi perjanjian. Masih terdapat kendala dalam pengawasan operasional serta pengaturan penggunaan fasilitas persampahan oleh masyarakat lintas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kesepakatan formal telah terpenuhi secara normatif, tetapi masih perlu penguatan pada aspek implementasi.

2. Frekuensi Pertemuan dan Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar pemerintah daerah telah dilakukan, namun belum memiliki jadwal koordinasi rutin dan terstruktur. Pertemuan lebih sering dilakukan ketika muncul permasalahan teknis di lapangan.

Menurut Rosnow (1984), frekuensi komunikasi yang berkelanjutan menjadi kunci efektivitas kerja sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator komunikasi belum sepenuhnya optimal karena koordinasi belum dilakukan secara sistematis dan berkala.

3. Keberlanjutan Program

Kerja sama pengelolaan sampah tetap berjalan hingga saat penelitian dilakukan, yang menunjukkan adanya keberlanjutan program. Pelayanan persampahan di wilayah perbatasan masih dilaksanakan sesuai pembagian tugas yang telah disepakati.

Namun demikian, keberlanjutan ini lebih bersifat administratif daripada berbasis pada evaluasi dan perencanaan jangka panjang bersama. Belum terdapat mekanisme pembaruan program secara berkala yang didasarkan pada hasil evaluasi bersama kedua daerah.

4. Manfaat yang Dirasakan

Dari hasil wawancara dan observasi, kerja sama ini memberikan manfaat dalam mengurangi potensi konflik kewenangan antar daerah serta membantu pengelolaan sampah di wilayah perbatasan.

Masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan persampahan, dan kedua pemerintah daerah memiliki dasar koordinasi dalam menangani persoalan lintas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator manfaat telah dirasakan, meskipun efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui penguatan pengawasan dan koordinasi teknis.

5. Evaluasi dan Umpan Balik

Indikator evaluasi dan umpan balik menjadi aspek yang paling lemah dalam pelaksanaan kerja sama ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi belum dilakukan secara rutin dan terjadwal. Umpan balik lebih bersifat informal dan situasional.

Menurut teori Rosnow, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kerja sama berjalan sesuai tujuan awal. Ketidakteraturan evaluasi menyebabkan permasalahan di lapangan cenderung diselesaikan secara reaktif, bukan preventif.

Secara keseluruhan, berdasarkan lima indikator Rosnow (1984), kerja sama pengelolaan sampah antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar telah memenuhi aspek kesepakatan formal dan manfaat yang dirasakan, namun masih perlu penguatan pada aspek komunikasi yang berkelanjutan, evaluasi rutin, dan pengembangan program jangka panjang.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kampar telah berjalan secara administratif dan operasional, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal.

Secara formal, kerja sama telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tetap dilaksanakan hingga saat penelitian dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen institusional dari kedua pemerintah daerah. Namun, berdasarkan analisis terhadap praktik di lapangan, ditemukan bahwa koordinasi belum dilakukan secara rutin dan terstruktur, evaluasi belum dilaksanakan secara berkala, serta pengawasan operasional masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian permasalahan cenderung bersifat reaktif dan belum berbasis pada perencanaan perbaikan berkelanjutan.

Di sisi lain, kerja sama tersebut tetap memberikan manfaat nyata dalam menjaga pelayanan persampahan di wilayah perbatasan dan meminimalkan potensi konflik kewenangan antar daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerja sama ini telah memenuhi aspek legalitas dan keberlangsungan program, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme komunikasi berkelanjutan dan sistem evaluasi bersama. Diperlukan penguatan sistem koordinasi dan evaluasi rutin agar kerja sama antar daerah tidak hanya berhenti pada kesepakatan formal, tetapi mampu menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Penelitian ini terbatas pada satu objek kerja sama dan periode pengamatan tertentu sehingga belum menggambarkan dinamika jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Agung Kurniawan, & Suswanta. (2021). Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 134–148. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2305>
- Amasuomo, E.; Baird, J. (2020). Waste generation and management: A review of global challenges and prospects. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 17(4), 2265–2280.
- Holimah, S., Pd, S., Wahyuni, S. A., Pd, S., Suhariyono, A., & Pd, S. (2024). *Sampah Kita , Masa Depan Kita : Solusi Ramah Lingkungan untuk Semua Orang*.
- Mehraj, T., & Shamim, A. A. (2020). *Concept of Governance*.
- Nugraha, A. B. (2022). Memperkuat Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Melalui Perspektif Trust Dan Modal Sosial. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 2(1), 69–85. <https://doi.org/10.47431/jmd.v2i1.210>
- Nurman, P. D., Al Sukri., S.Sos., M. S., & Lilis Suryani, S.Sos., M. s. (2023). *Teori Administrasi Administrative Exsecutive*. Deepublish (CV BUDI UTAMA).
- Peters, B. G. (2020). *The Politics of Bureaucracy*. Routledge.
- Pribadi, Y. (2021). Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 12(1), 71–81. <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218>
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). *Public Administration Understanding Management Politics And Law In The Public Sector*. Routledge.